

**PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN DI MASA DEPAN**

Oleh : Nanik Pujiastuti

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Sustainable development emerged as a new concept or approach, as a correction to the development policies or strategies adopted after World War II until the 1980s, which were deemed to have failed to achieve their objectives, namely creating prosperity for the people of today and for future generations. This concept was born out of a growing awareness that economic development had exceeded the carrying capacity of the natural environment, calling into question the sustainability of efforts to build prosperity and even the survival of humanity on this earth.

Indonesia is hosting a world conference that will discuss the issue of climate change caused by human lifestyles and cruelty towards nature and the environment.

However, when we talk about “environment” in the concept of sustainable development, the meaning is not limited to the natural environment but also the socio-economic environment. There is a close relationship and reciprocal influence between the two. Therefore, in the development concept that we want to develop, development should not only pursue growth, even though growth is important and necessary to overcome unemployment and poverty. However, how that growth is generated and how it is distributed is no less important than the growth itself.

Key Word: *Public Policy, development*

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan tampil sebagai konsep atau pendekatan baru, sebagai koreksi atas kebijakan-kebijakan atau strategi pembangunan yang dianut pasca Perang Dunia ke II sampai dasawarsa 1980-an yang dinilai gagal mencapai tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat masa kini maupun umat manusia di masa yang akan datang. Konsep ini dilahirkan oleh bangkitnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi telah melampaui daya dukung lingkungan alam, sehingga keberlanjutan upaya membangun kesejahteraan bahkan kelangsungan kehidupan umat manusia di atas bumi ini dipertanyakan.

Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi dunia yang akan membahas mengenai masalah perubahan iklim yang disebabkan oleh pola kehidupan dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap alam dan lingkungannya.

Namun apabila kita berbicara mengenai “lingkungan” dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, pengertiannya bukan hanya terbatas pada lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial-ekonomi. Ada keterkaitan yang erat dan pengaruh timbal balik antara keduanya. Oleh karena itu, maka dalam paham pembangunan yang ingin dikembangkan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan,

meskipun pertumbuhan itu penting dan tidak dapat tidak harus ada untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Tetapi, bagaimana pertumbuhan itu dihasilkan dan bagaimana pendistribusianya, tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan itu sendiri.

Key Word : Public Policy, pembangunan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan administrasi publik di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Dengan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, inovasi kebijakan menjadi elemen penting dalam mempercepat proses reformasi administrasi publik. Inovasi kebijakan ini mencakup berbagai perubahan dalam sistem, regulasi, dan praktik administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Perkembangan administrasi publik di Indonesia telah melalui berbagai fase, dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga era modern. Awalnya, administrasi publik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang cenderung birokratis dan sentralistik. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun sistem administrasi negara yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan kebutuhan pembangunan. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh berbagai paradigma dan teori administrasi publik yang berkembang secara global, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Fase-fase Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia:

a. Masa Kolonial Belanda:

Sistem administrasi publik di Indonesia pada masa ini didominasi oleh model birokrasi yang

sentralistik dan hierarkis, dengan pengaruh kuat dari militer Belanda.

b. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950):

Indonesia baru merdeka dan sedang membangun sistem administrasi negara. Fokusnya adalah pada penyusunan dasar-dasar hukum dan organisasi pemerintahan, namun belum ada upaya penyempurnaan sistem secara menyeluruh.

c. Masa Orde Lama (1950-1966):

Pada masa ini, terjadi berbagai upaya untuk menata sistem administrasi negara, termasuk pembentukan kabinet-kabinet baru dan program-program pembangunan. Namun, situasi politik yang tidak stabil dan ketidaknetralan birokrasi menjadi tantangan.

d. Masa Orde Baru (1966-1998):

Orde Baru berusaha membangun administrasi negara yang lebih efisien, rasional, dan berorientasi pada pembangunan. Meskipun ada upaya untuk mengurangi birokrasi, namun praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) masih menjadi masalah.

e. Masa Reformasi (1998-sekarang):

Reformasi politik dan desentralisasi mendorong perubahan besar dalam sistem administrasi publik. Muncul tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dihadapi

adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan itu dijalankan, menjadi tugas dari administrasi publik dan mampukah administrasi publik mengemban amanat tersebut ?

2. METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Administrasi Publik Lama

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi.

Berbagai aspek administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak peradaban manusia mulai terstruktur. Kekaisaran Romawi kuno, berbagai dinasti di China, misalnya, bahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara pun sebenarnya telah mempraktekan admininstrasi. Awal pemikiran atau embrio dari konseptualisasi administrasi publik modern tidak terlepas dari para pemikir mengenai politik dan pemerintahan.

Banyak ahli sepakat bahwa dasar-dasar pemikiran administrasi publik modern diletakkan oleh seorang profesor ilmu politik yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson (1992). Pemikiran Wilson dituangkan didalam tulisannya yang diberi judul, " The Study of Administration" yang diterbitkan pada tahun 1873. Konsep dari Wilson yang terkenal adalah pemisahan antara politik dan admininstrasi publik. Sejak itu, selama satu abad lebih administrasi

publik, baik sebagai bidang studi maupun sebagai profesi terus berkembang.

Banyak pemikiran baru lahir pada sekitar pertengahan abad ke 20, antara lain yang besar sekali dampaknya pada perkembangan ilmu administrasi, adalah dari Simon (1976) seorang ahli ekonomi, yang kemudian memperoleh hadiah Nobel. Ia mengetengahkan pandangan yang terus melekat dalam perkembangan ilmu ini selanjutnya, yaitu bahwa pada intinya administrasi adalah pengambilan keputusan.

Menjelang dan memasuki Perang Dunia II program sosial yang besar, seperti New Deal di Amerika Serikat dan pengendalian mesin perang telah menampilkan administrasi publik pada tataran yang makin menonjol. Program rehabilitasi pasca perang dunia serta bangkitnya negara-negara baru yang sebelumnya adalah wilayah-wilayah jajahan makin memperbesar peran administrasi publik.

Upaya mengembangkan administrasi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri diperkuat dengan studi perbandingan administrasi publik, antara lain dengan dibentuknya Comparative Administration Group (CAG) pada tahun 1960 oleh para pakar administrasi, seperti John D. Montgomery, William J. Siffin, Dwight Waldo, George F. Grant, Edward W. Weidner, dan Fred W. Riggs. Dari CAG inilah lahir konsep administrasi pembangunan (development administration), sebagai bidang kajian baru. Kelahirannya didorong oleh kebutuhan membangun administrasi di negara-negara berkembang.

Pada dua dasawarsa akhir abad ke 20, dunia kembali mengalami perubahan besar. Runtuhnya komunisme dan terjadinya proses globalisasi telah menimbulkan

kebutuhan akan pendekatan-pendekatan baru dalam ilmu-ilmu sosial.

B. Administrasi Publik Baru

Pemikiran dalam administrasi yang berkembang selanjutnya sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). Pemikiran ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaranya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Kesemua itu menuntut reorientasi peranan administrasi publik.

Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan begitu administrasi publik haru mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan-gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.

Drucker (1989) menegaskan bahwa apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya jangan dilakukan oleh pemerintah. Itu tidak berarti bahwa pemerintah harus besar atau kecil, tetapi pekerjaannya harus efisien dan efektif. Seperti juga dikemukakan oleh Wilson (1992), birokrasi tetap diperlukan tetapi harus

tidak birokratis. Osborne dan Gaebler (1993) mencoba "menemukan kembali pemerintah", dengan mengetengahkan konsep entrepreneurial government.

Memasuki dasawarsa 80-an tampil manajemen publik (public management) sebagai bidang studi yang makin penting dalam administrasi negara. Manajemen publik yang di masa lalu lebih banyak memberi perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi. Manajemen publik kini juga mencakup manajemen dalam sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian dan pengawasan, serta berbagai aspek lainnya.

Bersamaan dengan menguatnya pengaruh managerialism dalam administrasi publik di Inggris dan beberapa negara lainnya, dan kemudian juga di Amerika Serikat muncul pemikiran baru dengan konsep "New Public Management" (NPM); pemikiran ini digagas oleh Patrick Dunleavy (1991) beserta rekannya. Konsep ini memfokuskan pada pemisahan birokrasi pada unit yang lebih kecil, kompetisi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan jasa publik, dan perubahan motivasi dari sekedar pelayan publik menjadi motif ekonomi, dengan memberikan insentif pada pelayanan publik seperti yang diberikan dalam usaha swasta. NPM menekankan performance sebagai kriteria utama, dengan menerapkan teknologi manajemen yang digunakan di lingkungan swasta ke lingkungan publik. Dan yang cukup mendasar pula adalah didorongnya swasta melakukan kegiatan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja birokrasi dalam pemerintah.

Konsekwensi dari penerapan konsep tersebut adalah perlunya reformasi birokrasi secara kelembagaan. Dari uraian di atas tampak bahwa administrasi publik modern, baik sebagai ilmu maupun dalam praktik, terus berkembang, baik di negara berkembang (sebagai administrasi pembangunan) maupun di negara maju dengan berbagai gerakan pembaharuan. Demikian juga terlihat bahwa ada konvergensi dari pemikiran-pemikiran yang melahirkan berbagai konsep pembangunan dengan pandangan-pandangan dalam ilmu administrasi yang mengarah pada makin terpusatnya perhatian pada aspek manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam berbagai pendekatan yang sedang berkembang, termasuk konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan paradigma dalam ekonomi pembangunan berjalan sejalan dengan paradigma administrasi publik yang berkembang sejak dekade 1990-an hingga dekade 2000-an, yaitu telah beralih dari paradigma pengembangan administrasi semata (empowering the administration) kepada paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam administrasi publik (empowering the people to become partners in public administration).

Paradigma perkembangan administrasi publik yang mengarah kepada demokratisasi administrasi publik merupakan perwujudan dari pergeseran paradigma government kepada paradigma governance.

Selain itu pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi serba elektronik. Istilah e-government dan e-governance merupakan cerminan dari penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi maka dapat

diprediksi bahwa di masa datang akan terjadi gelombang perubahan yang besar lagi dalam paradigma administrasi publik.

Bukankah Undang-undang Dasar kita sendiri mengingatkan bahwa "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan"? Apabila peran penyelenggara negara (untuk sementara kita kaitkan dengan administrasi publik) demikian pentingnya, maka amat penting pula mengadakan revitalisasi administrasi publik dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan pengertian itu, kita akan membahas berbagai pokok pikiran tentang pembangunan berkelanjutan dan peran administrasi publik dalam upaya mewujudkannya.

C. Pembangunan Yang Berkelanjutan Pembangunan Yang Berkeadilan

Pembangunan nasional yang dinilai berhasil pada hakikatnya adalah yang dilakukan oleh dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).

Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila dilaksanakan oleh dan hasilnya dirasakan secara meluas dan merata. Dengan basis perekonomian yang lebih luas tidak terpusat pada perorangan, sekelompok orang atau perusahaan, atau daerah tertentu ketahanan perekonomian nasional terhadap goncangan-goncangan ekonomi eksternal dan

internal menjadi lebih kukuh. Inti dari semua itu adalah pentingnya mengembangkan ekonomi rakyat sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional.

Arah perkembangan ekonomi seperti itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Bahkan pengalaman empiris menunjukkan bahwa dengan hanya pendekatan pertumbuhan yang terjadi justru adalah sebaliknya, yaitu makin melebarnya kesenjangan sosial ekonomi; yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau bahkan makin miskin. Masalah utamanya, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya mengatasi tantangan itu adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering and sustainable" (Chambers, 1995).

Secara praktis upaya yang merupakan pengerasan sumberdaya

untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern –seperti kerja keras, disiplin, taat azas, taat waktu, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat, kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Kesemuanya itu merupakan tantangan yang dihadapkan kepada negara, yang berkewajiban untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan sendirinya aparat negara atau administrasi publiklah yang memegang tanggung jawab utama mewujudkan berbagai cita-cita dan keinginan membangun kehidupan yang lebih baik itu.

D. Patologi Birokrasi

Tantangan yang besar yang dihadapi administrasi publik dihampir semua negara, adalah prevalensi dari patologi birokrasi, yaitu kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self-serving), mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat (centralized), dan dengan kewenangannya yang besar, sering kali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri. Khususnya di negara berkembang, Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi publik yang umum ditemukan.

Pertama, pola dasar atau (basic pattern) administrasi publik di negara berkembang, bersifat elitis, otoriter, menjauh (aloof) atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta paternalistik. **Kedua**, birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Yang justru kurang adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen (management capacity) yang memadai, memiliki keterampilan-keterampilan pembangunan (development skills), dan penguasaan teknis (technical competence). **Ketiga**, birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain daripada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan (performance oriented). Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang kepentingan masyarakat (public principled interest). Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan

aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. **Keempat**, adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and reality). Riggs (1964) menyebutkan fenomena umum ini sebagai formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan perundang-undangan yang tidak mungkin atau tidak pernah dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang menetapkannya, memusatkan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi dan pendeklegasian kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi. **Kelima**, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat "otonom", artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis.

Administrasi publik selama ini cenderung masih berorientasi pada konsep-konsep pembangunan lama, sehingga untuk menghadapi tantangan-tantangan baru perlu penyegaran dan pembaharuan atau singkatnya revitalisasi.

4. PENUTUP

1. Dalam menghadapi kecenderungan dan masa depan administrasi publik, terutama pengaruh demokratisasi, lingkungan hidup, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi, harus ada antisipasi disertai upaya

- dan langkah yang tepat didalam studi dan praktek administrasi publik. Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci penting agar semua kebijakan yang menyangkut pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan bukan hanya dengan hasil yang baik tetapi juga mendapat dukungan yang luas. Tanpa upaya-upaya ini niscaya administrasi publik di Indonesia akan ketinggalan, tidak dapat memecahkan masalah-masalah administrasi, dan pada gilirannya bangsa Indonesia tidak akan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan dapat menjadi hambatan bagi pembangunan berkelanjutan. Masalah ini merupakan hasil buruk dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan masyarakat dunia. Ketika kita bicara pelestarian lingkungan, kebijakan yang dibuat umumnya hanya menyangkut sektor formal, kita lupa bahwa banyak rakyat miskin yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya dengan memanfaatkan bahkan merusak lingkungan. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan conditio sine qua non bagi pembangunan berkelanjutan.
 3. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat dengan rambu-rambu kebijakan publik yang dibuat oleh para pembuat kebijakan, memerlukan konsep dan praktek administrasi publik yang memadai. Karenanya administrasi publik di Indonesia harus direvitalisasikan, agar dapat memfasilitasi upaya bangsa dalam melakukan dan melanjutkan

pembangunan, demi kepentingan bangsa saat ini dan generasi dimasa yang akan datang. Untuk itu berbagai kelemahan yang dihadapi didalam proses pengembangan dan revitalisasi ilmu administrasi publik harus ditemui kenali akar masalahnya dan ditemukan jalan pemecahannya. Beberapa diantaranya telah dikemukakan di atas.

4. Dengan langkah revitalisasi, diharapkan administrasi publik dapat menghasilkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang aplikatif serta mutahir sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sukses dan gagalnya penyelenggaraan pemerintahan salah satu penyebabnya adalah kesalahan dari penerapan disiplin administrasi publik, maka tugas para pelajar, ilmuwan dan praktisi administrasi publik untuk membenahi dan meluruskan praktek-praktek administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar pembangunan di Indonesia bersifat adil dan demokratis sehingga dapat senantiasa berkesinambungan.
5. Perkembangan administrasi publik di Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, administrasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAFI

Chambers, Robert. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality

- Counts?", dalam Üner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People: From Improverishment to Empowerment*. New York: New York University Press. 1995.
- Drucker, Peter F. *The New Realities in Government and Politics/InEconomics and Business/In Society and World View*. New York: Harper & Row Publisher, 1989.
- Dunleavy, Patrick. *Democracy, Bureaucracy and Public Choice*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Gulick, Luther dan Lyndall Urwick (eds.) *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration, 1937.
- Heady, Ferrel. *Public Administration: A Comparative Perspective*. 5th, ed. New York: Marcel Dekker, 1995.
- Brundtland Commission. 1987.
- Montgomery, John D. *Bureaucrats and People: Grassroot Participation in Third World Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguin. 1993.
- Riggs, Fred W. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1964.
- Rondinelli, Dennis A. *Why Secondary Cities are Critical for National Development, Secondary Cities in Developing Countries: Policies for Diffusing Urbanization*.
- Beverly Hills: Sage Publications. 1983.
- Simon, Herbert A. *Administrative Behaviour: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization*. London: MacMillan Publishing Company. 1976.
- Taylor, Frederick W. *Scientific Management*. Testimony before the US House of representatives. 25 Januari, 1912.
- Weber, Max. "Bureaucracy", dalam Hans H. Gerth, From Max Weber: *Essay in Sociology*. London: Oxford University Press, Inc. 1973 (Dimutakhirkan)..
- Wilson, Woodrow. "The Study of Administration", dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (ed.). *Classic of Public Administration*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company. 1992.

VOLUME 26 NO 2 DESEMBER 2025

ISSN CETAK 1412-6877

ISSN ONLINE 2528-0538